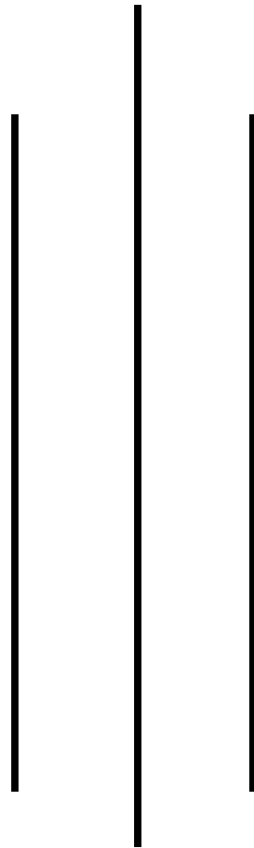


LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SINAR KUTA MULIA
TAHUN 2025



Jalan Raya Kuta No.61X Kuta Badung
TELEPON: 0361 754078

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

| Informasi Umum BPR | |
|--------------------|--|
| Nama BPR/BPRS | PT BPR SINAR KUTA MULIA |
| Alamat | Jln Raya Kuta No 61X Kuta, Badung |
| Nomor Telepon | (0361) 754078 |

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Sinar Kuta Mulia pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Sinar Kuta Mulia memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Sinar Kuta Mulia dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Sinar Kuta Mulia didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Sinar Kuta Mulia.

BPR Sinar Kuta Mulia telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Sinar Kuta Mulia selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Sinar Kuta Mulia terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

| | |
|--|----------------|
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | 2. Baik |
|--|----------------|

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| | | |
|---|---------|-------------------------|
| 1. | Nama | I Gede Sukrawan |
| | Jabatan | Direktur Utama |
| <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Mengkinikan ketentuan atau SOP yang belum diatur dalam pedoman internal bank. Memantau penurunan NPL, efisiensi biaya yang bisa dilakukan dengan cara menempatkan idle fund yang optimal serta memastikan BPR beroperasi secara sehat dan menguntungkan bagi Pemegang Saham, manajemen, karyawan dan masyarakat luas. Melakukan pengawasan terhadap resiko Teknologi Informasi dan pelaksanaannya agar aman, dapat dipercaya, berkelanjutan dan stabil. | | |
| 2. | Nama | Ni Putu Ari Supradnyani |
| | Jabatan | Direktur Kepatuhan |
| <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur merangkap Kepatuhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan Operasional Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank. Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik diantara kepala bagian atau bawahannya. Mengevaluasi, mengembangkan kemampuan dan secara berkala menilai prestasi kerja karyawan/karyawati. Menghadiri semua rapat direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan baik yang dilakukan oleh Direksi maupun pegawai BPR. | | |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- Direksi selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
- Direksi telah mengupayakan agar Cash Ratio tetap berada pada kisaran yang memadai
- Pergantian core banking telah dapat terimplementasi dengan baik pada tahun 2025

- e. Sebagian besar temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti pada desember 2025.
- f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Pelatihan in house training untuk karyawan telah dilaksanakan melalui zoom meeting dan tatap muka

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| | | |
|---|---------|-------------------------|
| 1. | Nama | Putu Gde Suartha |
| | Jabatan | Komisaris Utama |
| <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris</p> <p>a. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman terbaru</p> <p>tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tanggal 6 Agustus 2021</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>e. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>f. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>g. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>h. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.</p> | | |
| 2. | Nama | I Made Mandia |
| | Jabatan | Komisaris |
| <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> | | |

ugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman terbaru teruang dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tanggal 6 Agustus 2021
- b. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- g. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- h. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Direksi agar meningkatkan LDR, disarankan kepada Direksi untuk sementara mengerem pertumbuhan dana dan sebaliknya memaksimalkan pertumbuhan kredit. Direksi disarankan untuk melakukan penyesuaian suku bunga kredit dengan suku bunga di pasaran.
- b. Direksi agar tetap mengupayakan penyaluran kredit UMKM, sebagai salah satu persyaratan untuk bisa menjadi penyalur KUR.
- c. Direksi agar tetap berupaya melakukan persiapan dan penjajagan di dalam upaya untuk bisa menjalankan transaksi jual beli VALLAS
- d. Dengan adanya pergantian core banking, Direksi diharapkan melakukan komunikasi dengan vendor agar masing-masing user memiliki password dan limit serta hak akses sendiri, memastikan agar setiap transaksi yang terjadi harus terdapat Checker, Maker dan Approval.
- e. Direksi agar menjajagi dan mencari informasi kepada BPR lain yang sudah dapat menyalurkan kredit KUR. jika memungkinkan BPR dapat ,encoba sebagai penyalur KUR sehingga pangsa pasar kredit menjadi lebih luas
- f. Direksi agar mengingatkan AO untuk lebih teliti dalam melihat risiko kredit dari nasabahnya dan agar dituangkan dalam analisa kredit beserta pengendalian dan pemantauannya.
- g. Direksi dalam penyusunan RBB tahun 2026 diharapkan jangan terlalu optimis karena menurut pengalaman sebelumnya target RBB sangat sulit dicapai. Direksi agar melakukan maintenance nasabah lama dengan kualitas baik dan menawarkan tambahan plapond

kredit.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nama | I Gede Sukrawan |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Ni Putu Ari Supradnyani |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1. | Nama | Putu Gde Suartha |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | I Made Mandia |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Tidak ada kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sinar Kuta Mulia

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

| | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | I Gede Sukrawan |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun | 0,00 |

| | | |
|----|---|-----------------------------|
| | Sebelumnya | |
| 2. | Nama | Ni Putu Ari Supradnyani |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

| | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Nama | Putu Gde Suartha |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
| 2. | Nama | I Made Mandia |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak ada kepemilikan saham pemegang saham pada kelompok usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | I Gede Sukrawan |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Ni Putu Ari Supradnyani |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | Putu Gde Suartha |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | I Made Mandia |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Tidak ada kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Nama | I Gede Sukrawan |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Ni Putu Ari Supradnyani |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Nama | Putu Gde Suartha |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di | Tidak ada |

| | | |
|----|--|---------------|
| | BPR | |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | I Made Mandia |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR
 Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Nama | I Gede Sukrawan |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Ni Putu Ari Supradnyani |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|------|------------------|
| 1. | Nama | Putu Gde Suartha |
|----|------|------------------|

| | | |
|----|--|------------------------------|
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Kompiang Sri Martini - istri |
| 2. | Nama | I Made Mandia |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga antara Anggota direksi dengan Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham

Komisaris utama Putu Gde Suartha memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham Kompiang Sri Martini (istri)

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------------|
| Jumlah Direksi Penerima Gaji | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp) | Rp370.800.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Gaji | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp) | Rp320.400.000 |

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|--------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tunjangan | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp) | Rp30.355.260 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan | 2 orang |

| | |
|---|---------------------|
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp) | Rp24.998.080 |
|---|---------------------|

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tantiem | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) | Rp194.600.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tantiem | 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp) | Rp177.800.000 |

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp) | Rp0 |

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 0 orang |
|--|----------------|

| | |
|--|---------|
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) | Rp0 |

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| | |
|--|----------|
| 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah | |
| Rasio (a/b) | 1,81 : 1 |
| 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah | |
| Rasio (a/b) | 1,09 : 1 |
| 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah | |
| Rasio (a/b) | 1,20 : 1 |
| 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi | |
| Rasio (a/b) | 1,11 : 1 |
| 5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi | |
| Rasio (a/b) | 2,87 : 1 |

nihil

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Tanggal Rapat | 11 Januari 2025 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: | | |
| Pelaksanaan rencana bisnis tahun 2024 | | |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | Tanggal Rapat | 14 April 2025 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Pergantian core banking dan Implementasi core banking yang baru | | |
| 3. | Tanggal Rapat | 15 Juli 2025 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja semester I tahun 2025 dan Implementasi Core banking yang baru. | | |
| 4. | Tanggal Rapat | 12 November 2025 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Pelaksanaan Rencana Bisnis bulan posisi Oktober 2025 dan Penyusunan Rencana Bisnis tahun 2026 | | |

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 4 (lima) kali dalam setahun pada tahun 2025

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

| | | |
|----|--------------------------------------|------------------|
| 1. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Putu Gde Suartha |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 4 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |
| 2. | Nama Anggota Dewan Komisaris | I Made Mandia |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 4 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |

Anggota dewan komisaris selalu hadir setiap diadakannya rapat dewan komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun | 0 kasus |

| | |
|---|----------------|
| Laporan | |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

| | |
|---|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun | 0 kasus |

| | |
|---|----------------|
| Laporan | |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

| | |
|---|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

Selama tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pengawai Tetap dan pegawai tidak tetap pada PT. BPR Sinar Kuta Mulia

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai | |
|--|---------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 kasus |

| 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian | |
|--|---------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |

Pada tahun 2025 tidak ada kasus pidana yang BPR hadapi

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2025 PT. BPR Sinar Kuta Mulia tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Sinar Kuta Mulia untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kuta, 20 April 2026

PT. BPR Sinar Kuta Mulia

Disetujui



Putu Gde Suartha
Komisaris Utama



I Gede Sukrawan
Direktur Utama